

PENGARUH PEMEGANG SAHAM INSTITUSI, KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PERUSAHAAN

Tetty Sulestiyo Rini, Imam Ghozali¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This research was aimed to examine empirically: (1) the influence of institutional ownership structure to profitability, (2) the influence of independent commissioners to profitability, (3) the influence of audit committee to profitability. Independent variables used in this study are institutional ownership structure, independent commissioners, audit committee. The dependent variable used in this study is profitability that measured by Return On Asset (ROA).

Samples of this research are manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) period 2008-2010. Data collected by purposive sampling method. Number of samples in this research is 171 firms. This study used multiple regression for data analysis.

The results of the research as follow: (1) the institutional ownership structure not significant influence to profitability, (2) the independent commissioners have positive and significant influence to profitability, (3) the audit committee have positive and significant influence to profitability.

Key words: Institutional Ownership Structure, Independent Commissioners, Audit Committee, Profitability.

PENDAHULUAN

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan untuk menentukan arah kinerja perusahaan. Pembahasan mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan karena lemahnya *Corporate Governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *Corporate Governance*.

Pada tahun 2001, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* menerbitkan pedoman *Good Corporate Governance*. Pedoman ini bertujuan agar dunia bisnis memiliki acuan dasar yang memadai mengenai konsep serta pola pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan pola internasional umumnya dan Indonesia khususnya. Penerapan *Corporate Governance* diharapkan memaksimalkan nilai perseroan bagi perseroan tersebut dan bagi pemegang saham. Ball (1998) dalam Evans et al. (2002), mengartikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat kesepakatan atau aturan institusi yang secara efektif mengatur pengambilan keputusan. Sejalan dengan *letter of intent* (LOI) yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF), yang mencatumkan jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar *good corporate governance* yang telah diterapkan di tingkat internasional (Sulistiyanto dan Lidyah, 2002).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Peran dan

¹ Tetty Sulestiyo Rini, Imam Ghozali

tuntutan investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang telah ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. *Corporate Governance* lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji *corporate governance* di suatu negara dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan dan bagaimana korelasi antar kebijakan tentang buruh dan kinerja perusahaan.

Dalam prakteknya, keberhasilan penerapan *Corporate Governance* tidaklah semudah memahami batasan atau konsepnya. Sebaik-baik prinsip-prinsip *Corporate Governance* dan peraturan bukanlah jaminan tidak akan timbul penyimpangan kalau tanpa adanya integritas termasuk moralitas para pelakunya. Tidak jarang terjadi fenomena kesalahpahaman, kekurang-taatan, dan konflik peran serta fungsi pengambilan keputusan diantara para pengelola perusahaan dan bahkan manipulasi keuangan oleh pihak direksi dan manajer. Kalau sudah seperti itu keberhasilan *Corporate Governance* sangat bergantung pada integritas dari para pengelola perusahaan bersangkutan.

Riset *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), 2002, menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi *Good Corporate Governance* merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi *Good Corporate Governance* berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan *Good Corporate Governance*, akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan. Maka dalam penelitian ini akan dianalisis, apakah praktek *corporate governance* dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan bagian dari kinerja ekonomi perusahaan karena cakupan pengukurannya yang lebih menyeluruh dan berfokus pada nilai keuangan yang dicapai oleh perusahaan mencakup pada aktiva, kewajiban dan ekuitas, serta laba bersih yang merupakan penghasilan perusahaan. Dengan kinerja keuangan maka dapat diukur konsisi keuangan suatu perusahaan dalam satu masa pelaporan, kondisi keuangan ini yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan para manajer untuk membuat pengungkapan. Karena dalam membuat pengungkapan tentunya diperlukan biaya yang tidak sedikit. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk membuat pengungkapan informasi sosial dan lingkungan (Fr. Retno, 2006).

Penelitian terhadap *Corporate Governance* di Indonesia banyak dihubungkan dengan kinerja perusahaan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yudha Pranata (2007), hasilnya adalah GCG berpengaruh positif terhadap *Return on Equity* (ROE), Tobin's Q dan *net profit margin* (NPM). Adanya beragam hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh Pranata (2007), Mas'ud (2003), Tarjo (2008), Sukamulja (2004), Darmawati dkk (2005) maka penelitian tentang *Corporate Governance* dengan faktor-faktornya dan faktor kinerja keuangan yang mempengaruhinya, menarik untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkap diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : (1) Apakah pemegang saham institusi mempengaruhi kualitas tingkat profitabilitas suatu perusahaan (2) Apakah komisaris independen mempengaruhi kualitas tingkat profitabilitas suatu perusahaan (3) Apakah komite mempengaruhi kualitas tingkat profitabilitas suatu perusahaan.

Sedang kegunaan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk memperjelas faktor-faktor *Good Corporate Governance* apa saja yang mempengaruhi tingkat profitabilitas dalam suatu perusahaan (2) Memberikan bukti empiris dari pengaruh faktor-faktor *Good Corporate Governance* dalam mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu perusahaan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.

Penilaian kinerja menurut Mulyadi (1997) adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran (Mulyadi, 1997). Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja dan waktu serta penghargaan baik yang bersifat instrinsik (Sucipto, 2003). Sedang menurut Purnomo (1998), kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu seperti investor, kreditor, manajer, calon kreditor, karyawan, pemerintah dan masyarakat dimana masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda.

Penilaian kinerja adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Ada dua bentuk kinerja, yakni kinerja operasional dan kinerja keuangan. Kinerja operasional lebih ditekankan pada kepentingan internal perusahaan seperti kinerja cabang atau divisi yang diukur dengan kecepatan dan kedisiplinan. Sedang kinerja keuangan biasanya diukur melalui rasio-rasio keuangan dan harga saham perusahaan dalam pasar modal (Mulyadi, 1999). James dan John (2005) menyatakan bahwa agar dapat mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya, analisis keuangan perlu melakukan pemeriksaan atas berbagai aspek keuangan perusahaan. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut adalah rasio keuangan (*financial ratio*).

Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Penilaian kinerja menurut Mulyadi (1997) adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran (Mulyadi, 1997). Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja dan waktu serta penghargaan baik yang bersifat instrinsik (Sucipto, 2003).

Menurut Purnomo (1998), kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu seperti investor, kreditor, manajer, calon kreditor, karyawan, pemerintah dan masyarakat dimana masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Penilaian kinerja adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Ada dua bentuk kinerja, yakni kinerja operasional dan kinerja keuangan. Kinerja operasional lebih ditekankan pada kepentingan internal perusahaan seperti kinerja cabang atau divisi yang diukur dengan kecepatan dan kedisiplinan. Sedang kinerja keuangan biasanya diukur melalui rasio-rasio keuangan dan harga saham perusahaan dalam pasar modal (Mulyadi, 1999). James dan John (2005) menyatakan bahwa agar dapat mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya, analisis keuangan perlu melakukan pemeriksaan atas berbagai aspek keuangan perusahaan. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut adalah rasio keuangan (*financial ratio*).

Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Pranata (2007) bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap ROE, Tobin's Q dan *net profit margin* (NPM). Sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan diambil secara *purposive sampling* yaitu perusahaan *go public* yang terdaftar di BEJ selama tahun 2001-2005 dan masuk dalam kelompok 10 besar berdasarkan indeks GCG. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap *Return on Equity* (ROE), Tobin's Q dan *net profit margin* (NPM) dan perubahan yang terjadi pada skor penerapan GCG disebabkan oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi.

Penelitian yang dilakukan oleh Deni Darmawati, Khomsiyah, Rika Gelar Rahayu tahun 2005 ini bertujuan untuk menginvestigasi keterkaitan *Corporate Governance* yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Data implementasi pada penelitian ini menggunakan *Corporate Governance* hasil survei IICG tahun 2001 dan 2002 yang berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) di tahun 2001 dan 2002 dengan jumlah sampel sebanyak 53 perusahaan-tahun (*pooled data* untuk tahun 2001 dan 2002). Sampel untuk tahun 2001 sebanyak 21 perusahaan dan tahun 2002 sebanyak 32 perusahaan.

Hubungan Pemegang Saham Institusi terhadap Tingkat Profitabilitas

Pemegang saham (bahasa Inggris: *shareholder* atau *stockholder*), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti: perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan saham institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Pranata dan Mas'ud (2003) menyatakan bahwa monitoring yang dilakukan oleh investor institusional tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer.

Dengan asumsi bahwa pemegang saham institusi dalam *corporate governance* mempengaruhi profitabilitas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Pemegang saham institusi berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas suatu perusahaan

Hubungan Komisaris Independen terhadap Tingkat Profitabilitas

Dewan Komisaris (DK) memegang peranan penting dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), karena DK merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota DK sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap Dewan Direksi (DD). DK seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota DK tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan

independensinya. Dalam banyak kasus, DK juga gagal untuk mewakili kepentingan stakeholders lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas.

Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) diperlukan anggota DK yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen; serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan Dewan Direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.

H2 : Komisaris independen berpengaruh positif dengan tingkat profitabilitas suatu perusahaan

Hubungan Komite Audit terhadap Tingkat Profitabilitas

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu DK, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada DK), kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari DK, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab Komite Audit akan dituangkan dalam Charter Komite Audit yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu financial reporting, corporate governance, dan risk and control management.

H3 : Komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas suatu perusahaan

METODE PENELITIAN

Variable Penelitian

a. Variabel Dependent:

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah tingkat profitabilitas suatu perusahaan, dapat dilihat dari data laporan keuangan suatu perusahaan, disini menggunakan ROA.

b. Variabel Independent

Variable independent dalam penelitian ini adalah faktor-faktor *Corporate Governance* yang erat kaitannya dengan kinerja keuangan khususnya terhadap tingkat profitabilitas suatu perusahaan

Faktor-faktor *Corporate Governance* :

- 1) Pemegang saham institusi
- 2) Komisaris independen
- 3) Komite Audit

Definisi Operasional Variabel

Pemegang saham Institusi

Pemegang saham (bahasa Inggris: shareholder atau stockholder), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. Pemegang saham institusi adalah para pemegang saham yang berada di suatu badan / institusi. Pada penelitian ini pemegang saham institusional diukur dengan prosentase besarnya pemegang saham institusional pada perusahaan yang bersangkutan.

Komisaris Independen

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT). Di Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari RUPS yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian dewan komisaris. Dalam pengangkatan dewan komisaris diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan dewan komisaris.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Komisaris independen dapat bertindak penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberi nasihat kepada manajemen (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Dalam penelitian ini proporsi komisaris independen dihitung dengan cara:

$$\text{Proporsi komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Komite Audit

Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, pengertian Komite Audit tidak diterangkan secara gamblang, tetapi pada intinya menyatakan bahwa Komite Audit adalah suatu badan yang berada dibawah Komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota Komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Hal tersebut senada dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jumlah komite audit hubungannya dengan profitabilitas suatu perusahaan.

Profitabilitas Perusahaan

Terdapat beberapa rasio dalam mengukur profitabilitas perusahaan, dalam penelitian ini digunakan rasio margin laba bersih, margin laba kotor (John dan James, 2005); ROA (Return on Asset) (Brammer dan Pevelin, 2006); Return on Equity (ROE) (Freedman dan Bikki, 1992). Pada penelitian ini menggunakan proksi atau ukuran profitabilitas perusahaan dengan menggunakan ROA.

Penentuan Sampel

Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pemilihan sampel yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada tahun 2008, 2009 dan 2010 yang secara berturut – turut menerbitkan laporan keuangan, sampel berjumlah 171 perusahaan manufaktur. Alasan mengapa tahun penelitian ini yang diamati karena untuk keakuratan penelitian dengan masa sekarang, sehingga dilaksanakan dengan data dalam tiga tahun terakhir.

Metode Analisis

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y	=	tingkat profitabilitas
α	=	konstanta (tetap)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	koefisien regresi
X1	=	pemegang saham institusi
X2	=	komisaris independen
X3	=	komite audit
e	=	kesalahan baku/error.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama tahun 2008-2010 dengan berbagai bidang kerja, seperti produksi manufaktur, food and beverages, mining, adhesive, textile, tobacco manufacturers, lumber and wood products, chemical and allied product, automotive, plastics, cement, fabricated glass products, machinery, cable, dan farmasi.

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian ini. Dari data awal berjumlah 171 observasi, ternyata ada cukup banyak data (yaitu 33 data) yang tidak normal sehingga data normalnya berjumlah 138 observasi.

Tabel 1.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemegang_shm_institusi	138	,19	1,29	,6226	,21779
Komisaris_independen	138	1,00	4,00	1,9058	,86191
Komite_audit	138	2,00	5,00	3,6739	,65249
Profitabilitas	138	,01	,15	,0663	,03074
Valid N (listwise)	138				

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata untuk Pemegang saham institusi memiliki nilai minimum sebesar 0,19 dan maksimum 1,29 serta nilai rata-rata sebesar 0,6226 serta standar deviasi 0,2179 yang artinya rata-rata perusahaan pada penelitian ini memiliki kepemilikan institusional sebesar 62,62%. Sedangkan untuk Komisaris Independen memiliki rata-rata sebesar 1,9058 dengan nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4 serta standar deviasi sebesar 0,86191. Artinya perusahaan memiliki anggota dewan komisaris independen rata-rata 2 orang. Komite Audit perusahaan memiliki nilai mean atau rata-rata sebesar 3,6739 dengan standar deviasi 0,65249 serta nilai minimum 2 dan maksimum 5. Artinya rata-rata perusahaan memiliki jumlah komite audit sebanyak 3 hingga 4 orang.

Untuk variabel profitabilitas perusahaan sampel memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum 0,15 serta nilai rata-rata sebesar 0,0663 artinya perusahaan memiliki tingkat keuntungan (ROA) nya sebesar 6,63%.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara parsial dengan menggunakan uji t, hasil uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	,063	,017		3,602	,000
	Pemegang_shm_institusi	,010	,012	,070	,815	,416
	Komisaris_independen	,542	,142	,629	3,828	,003
	Komite_audit	,207	,082	,439	2,511	,041

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

Hipotesis Pertama

Dari tabel diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel Pemegang Saham institusi adalah sebesar $0,461 > 0,05$ sehingga artinya hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Jadi tidak terdapat pengaruh signifikan antara PS terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Artinya meskipun semakin tinggi nilai kepemilikan institusional maka tidak akan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan yang bersangkutan.

Hipotesis Kedua

Dari tabel 4.7. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel Komisaris Independen adalah sebesar $0,003 < 0,05$ sehingga artinya hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Nilai koefisien regresi sebesar $+0,542$ menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. Jadi Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Artinya semakin tinggi Komisaris Independen akan semakin meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan.

Hipotesis Ketiga

Dari tabel 4.7. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel Komite Audit adalah sebesar $0,041 < 0,05$ artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Nilai koefisien regresi sebesar $0,207$ menunjukkan pengaruhnya positif. Jadi Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Pembahasan

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel Pemegang saham institusi lebih besar daripada $0,05$ sehingga artinya hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Jadi tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PS terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Artinya meskipun semakin tinggi nilai kepemilikan institusional maka tidak menjamin semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan yang bersangkutan. Kepemilikan saham institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan tetapi dalam penelitian ini kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROA) perusahaan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena tingkat kepemilikan institusional tidak memiliki wewenang langsung dalam mempengaruhi dan memonitor perusahaan sehingga tidak langsung akan semakin meningkatkan profitabilitas.

Dari hasil pengujian hipotesis kedua terbukti secara empiris bahwa nilai signifikansi t untuk variabel Komisaris Independen lebih kecil daripada $0,05$ sehingga artinya hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Nilai koefisien regresi sebesar $+0,542$ menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. Jadi Komisaris Independen berpengaruh positif

dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Artinya semakin tinggi Komisaris Independen akan semakin meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan. Dewan Komisaris (DK) memegang peranan penting dalam implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*, karena DK merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Maka dengan semakin tingginya prosentase Dewan Komisaris Independen tentunya akan semakin meningkatkan kinerja dan profit perusahaan yang bersangkutan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga ternyata nilai signifikansi t untuk variabel Komite Audit lebih kecil daripada 0,05 sehingga artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Dilihat dari nilai koefisien regresi positif berarti pengaruhnya positif. Jadi KAI berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Keberadaan komite audit berhasil mempengaruhi profitabilitas perusahaan karena semakin efektif pengawasan komite audit akan membuat kinerja perusahaan optimal sehingga akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka kesimpulannya adalah: PS (Pemegang saham institusi) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. DKI (Dewan komisaris independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. KAI (Komite Audit Independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

Penelitian ini memiliki implikasi bahwa secara teoritis mendukung pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap profitabilitas, sesuai dengan teori keagenan, bahwa dengan adanya keberadaan komisaris independen dan komite audit akan membuat semakin baik monitoring yang dilakukan dan memperkecil biaya keagenan yang terjadi pada sebuah perusahaan.

Saran

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya para investor dalam menanamkan investasinya pada sebuah perusahaan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaannya, yaitu dewan komisaris independen dan komite audit independen karena berdasarkan pada penelitian ini variabel tersebut berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.
2. Para emiten dalam menetapkan kebijakan atau strategi keuntungan perusahaannya juga mempertimbangkan ketiga faktor tersebut supaya dimasa mendatang dapat meningkatkan profitabilitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan prosentase kepemilikan institusional, memonitor kerja dewan komisaris independen dan komite auditnya.
3. Pada penelitian berikutnya dapat ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi tingkat profitabilitasnya, seperti kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan.

REFERENSI

- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. 2004. Komisariss Independen. Penggerak Praktik GCG di Perusahaan. PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Chtourou, Sonda MARRAKCHI, Jean Bedard, dan Lucie Courteau, 2001, “*Corporate Governance and Earnings Management*”, Working paper, April.
- Darmawati, Khomsyiah dan Rika Gelar R, (2005), “Hubungan *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan”, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Yogyakarta, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Vol 8, No. 1, Januari 2005.
- Evans, John, Robert Evans dan Serena Loh. *Corporate Governance and Declining Firm Performance*. International Journal of Business Studies (June): 1-18.
- Ghozali, Imam. 2005. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
- James C, Van Horne dan John M. Wachowics, JR. 2005, ‘*Fundamental of Financial Management*’, Salemba Empat.
- Komite Kebijakan Corporate Governance, “*Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*”, (Jakarta: KNKG, 2006).
- Mulyadi. 1997. *Akuntansi Manajemen: Konsep, manfaat dan rekayasa*. (Edisi kedua). Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Purnomo, yogo. 1998, “Keterkaitan Kinerja Keuangan dengan Harga Saham”, *Jurnal Keuangan* no 12.
- Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, (2005), *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat)*, cetakan pertama, PT. Damar Mulia Pustaka.
- Sukmawati Sukamulja, 2004, “*Good Corporate Governance Di Sektor Keuangan: Dampak GCG Terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus di Bursa Efek Jakarta)*”, *Benefit*, Vol. 8, No.1 Juni 2004.
- Sulistyanto, H. Sri, dan Rika Lidyah, 2002, “*Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan*”, *MODUS*, Vol.14 (1), Februari.
- Sunarto, 2003, “*Corporate Governance Dan Kinerja Saham*”, *Fokus Ekonomi*, Vol.2, No.3. Desember 2003.
- Wright, D.W., 1996, "Evidence on The Relation Between Corporate Governance Characteristics and The Quality of Financial Reporting", Working paper.
- Yudha Pranata, 2007, “*Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*”, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.



SK BAPEPAM No. SE-03/PM/2002.

SK BAPEPAM No. KEP-103/MBU/2002.

SK BAPEPAM No. KEP-41/PM/2003.

UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

PSAK No. 1, Standar Akuntansi Keuangan 2010

<http://indosdm.com/sumberdaya-manusia-dan-good-corporate-governance>

www.idx.co.id dan www.yahoo.com dan www.google.com

www.wikipedia.org dan www.iicg.org